

**LAPORAN KEGIATAN**

**FORUM**

**KONSULTASI**

**PUBLIK**

**STANDAR**

**PELAYANAN**

**BALAI KIPM MATARAM**

**TAHUN 2025**

---

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sasaran	3
BAB II. Pelaksanaan Kegiatan	4
2.1 Waktu dan Lokasi	4
2.2 Peserta Kegiatan	4
2.3 Susunan Acara dan Materi	4
2.4 Diskusi dan Tanya Jawab	13
2.5 Foto Kegiatan	15
BAB III. Penutup	16
3.1 Kesimpulan	16
3.2 Saran	16
Lampiran	17

# 01

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Reformasi birokrasi di Indonesia mempunyai semangat meningkatkan kualitas layanan untuk masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam salah satu area perubahan reformasi birokrasi, yaitu pelayanan publik.

Tujuan reformasi birokrasi di antaranya adalah meniadakan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas pembuatan dan implementasi kebijakan publik, meningkatkan efisiensi (baik dalam segi biaya dan waktu) pada setiap pelaksanaan tugas organisasi, menjadikan birokrasi di Indonesia lebih antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi tuntutan perubahan di dalam masyarakat serta membentuk *most improved bureaucracy*. Berdasarkan tujuan tersebut, reformasi birokrasi jelas ingin mencapai peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam hal kualitas pelayanan publik, Pemerintah belum dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan tantangan yang dihadapi, yaitu perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat. Hal ini dapat dilihat dari nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Nasional pada tahun 2022 walaupun mengalami peningkatan akan tetapi tidak signifikan yaitu senilai 0,08 yang semula pada tahun 2021 senilai 3,79 menjadi 3,87 pada tahun 2022.

Untuk meminimalisasi kesenjangan yang telah terjadi khususnya area Pelayanan Publik, Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah berupaya menetapkan langkah-langkah strategis antara lain penyusunan regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Salah satu regulasi turunan dimaksud adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Standar Pelayanan bertujuan memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Standar Pelayanan wajib dilakukan pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dilakukan untuk menilai apakah Standar Pelayanan yang sudah disusun dapat dilaksanakan dengan baik, apa yang menjadi faktor kunci keberhasilan dan apa yang menjadi faktor penghambat. Metode yang dapat dipergunakan antara lain: analisis dokumen, survei, wawancara, dan observasi. Survei dapat dilakukan dengan menggunakan metode Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Evaluasi Standar Pelayanan adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu penerapan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dan/atau kegagalan dalam rangka penerapan Standar Pelayanan. Proses evaluasi juga mempertimbangkan pengaduan pelayanan public yang diperoleh, serta hasil dari Survei Kepuasan Masyarakat.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan, penyelenggara pelayanan dapat melakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik/inovasi secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan penyelenggara pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

## **1.2. Dasar Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Standar Pelayanan Balai KIPM Mataram Tahun 2025 :

1. Undang-Undang Karantina Ikan Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Keputusan Kepala Badan Nomor 82/KEP-BKIPM/2019 Tentang Standar Pelayanan Publik Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dilaksanakannya Forum Konsultasi publik ini adalah sebagai sarana komunikasi agar masyarakat mengetahui Standar Pelayanan yang berlaku di Balai KIPM Mataram dan masyarakat yang dapat menilai kualitas layanan yang diberikan, apakah pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

dan berperan serta dalam memberikan saran atas Standar Pelayanan yang berlaku di Balai KIPM Mataram serta dijadikan bahan penyempurnaan Standar Pelayanan yang disusun sehingga dapat mempermudah dalam pelaksanaan pelayanannya serta dapat, selain itu

Sedangkan tujuan dilaksanakannya Forum Konsultasi publik adalah :

- a. Mendapatkan saran dan masukan atas Standar Pelayanan yang berlaku di Balai KIPM Mataram;
- b. Saran dan masukan yang dihimpun dari peserta Forum Konsultasi publik dijadikan bahan penyempurnaan Standar Pelayanan yang disusun.

### **1.4. Sasaran**

Sasaran dari kegiatan ini adalah pengguna jasa, instansi terkait, akademisi, organisasi masyarakat sipil, media massa dan masyarakat umum yang mempunyai keterkaitan atau kepentingan dengan Balai KIPM Mataram.

# 02

## PELAKSANAAN KEGIATAN

### 2.1. Waktu dan Lokasi

Forum Konsultasi Publik dilaksanakan secara daring dan luring yaitu :

Hari / Tanggal : Jumat, 16 Mei 2025

Tempat : Ruang Rapat Balai KIPM Mataram

Zoom ID : 817 3345 8146, password : publik

Waktu : 09.30 WITA sampai selesai

### 2.2. Peserta Kegiatan

Kegiatan Forum Konsultasi Publik dilaksanakan secara daring dan luring, yang terdiri dari instansi terkait, Pemerintah Daerah, akademisi, pelaku usaha perikanan, dan tokoh masyarakat.

### 2.3. Susunan Acara dan Materi

Susunan Acara : 1. Pembukaan

1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
2. Pembacaan Doa
3. Sambutan dan Penyampaian Profil UPT Badan Mutu KKP NTB
4. Pemaparan Materi
5. Diskusi dan Tanya Jawab
6. Foto Bersama
7. Penutupan

Materi disampaikan oleh tiga narasumber yaitu :

1. Plt. Kepala Balai KIPM Mataram, Bapak M. Farchan dengan materi : Tugas Fungsi Badan Mutu KKP NTB;
2. Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Ibu Ni Luh Anggra Lasmika dengan materi : sosialisasi Aplikasi Si Chupang New;
3. Inspektur Mutu Balai KIPM Mataram, Ibu Amira Baihani dengan materi: Standar Pelayanan Balai KIPM Mataram Tahun 2025.

Kegiatan forum konsultasi publik Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan di Kantor Balai KIPM Mataram diawali dengan registrasi oleh peserta undangan. Acara forum konsultasi publik dihadiri oleh instansi terkait yakni Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Mataram, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima, Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kantor Bea dan Cukai Provinsi Nusa Tenggara Barat, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan NTB, BI Nusa Tenggara Barat, Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat, Balai Besar Badan POM Mataram, BPBL Sekotong, Fakultas Perikanan Universitas 45 Mataram, Fakultas Perikanan Universitas Mataram, para pelaku usaha Unit Pengolahan Ikan/supplier lingkup Balai KIPM Mataram, dan beberapa orang Tokoh Masyarakat.

Acara dimulai pukul 09.00 WITA diawali oleh pembukaan oleh MC yakni membacakan susunan acara forum konsultasi publik. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama oleh seluruh undangan. Kemudian pembacaan doa yang dilanjutkan oleh sambutan Plt.

Kepala Balai KIPM Mataram yakni bapak M. Farchan, S.Pi., M.P sekaligus pemaparan profil Badan Mutu KKP Nusa Tenggara Barat.

Acara inti yakni pemaparan materi forum konsultasi publik dipandu oleh moderator yakni Bapak M. Farchan dengan narasumber yakni Ibu Ni Luh Anggra Lasmika, S.St.Pi., M. Tr.Pi. dan Ibu drh. Amira Baihani. Adapun penyampaian materi yakni kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Adapun rangkuman materi forum konsultasi publik adalah sebagai berikut :

Materi pertama :

Tugas dan Fungsi Badan Mutu KKP NTB yaitu :

Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

➤ Hulu/ Primer :

1. Unit Budidaya :

- a. Pabrik/ Distributor/ Toko Pakan
- b. Toko Obat
- c. Hatchery
- d. Tambak/ Kolam

Sertifikat yang dihasilkan :

- a. Sertifikat CBIB
- b. Sertifikat CPIB

2. Kapal Perikanan :

- a. Kapal
- b. Pelabuhan

Sertifikat yang dihasilkan :

- a. Sertifikat CPIB Kapal

➤ Hilir/ Pasca Panen :

1. UPI
2. Supplier
3. Cold Storage
4. Pasar Traadisional
5. Pasar Modern

➤ Negara Tujuan Ekspor :

1. Singapore
  2. Malaysia
  3. United States
  4. China
  5. Taiwan
  6. Philipines
  7. Thailand
  8. Hongkong
- Komoditas Ekspor :
1. Swordfish Steak
  2. Bahan Olahan Asal Ikan
  3. Tengiri Segar
  4. Frozen Lobster Whole
  5. Rumput Laut
  6. Kerapu
  7. Kakap
  8. Olahan Tuna Beku
  9. Frozen Tuna
  10. Salted Jellyfish
- Perusahaan Ekspertir
- Kegiatan Inspeksi dan Pengawasan
- Kegiatan Pengujian Laboratorium
- Sinergitas SJMKHP dengan pemerintah Prov. NTB

Materi kedua :

- Prestasi yang telah diraih dengan adanya inovasi digital berupa aplikasi Si Chupang New yaitu :
1. Pemenang TOP 5 Inovasi Pelayanan Publik PAN RB Tahun 2021 mewakili KKP
  2. Pemenang TOP Digital Award 2021 mewakili KKP
  3. Pemenang Gold Winner PR Kategori Kementerian Sub Kategori Aplikasi Tahun 2022 mewakili KKP

#### 4. Peraih Nominasi pada Ajang KIPP KKP Tahun 2024

- Bentuk Penghargaan KKP, sarver Aplikasi Si Chupang New telah Masuk dalam sarver Pusdatin KKP sehingga tidak memerlukan anggaran sewa sarver kepada vendor.
- Dampak positif dari adanya inovasi aplikasi Si Chupang New bagi Internal dan Eskternal :
  1. Terjadi pengurangan waktu layanan dari 1 - 4 hari menjadi 30 menit
  2. Sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 kegiatan ekspor mengalami kenaikan signifikan mulai dari 148 frekuensi menjadi 1198 frekuensi (naik sebesar 809,46%), dengan nilai ekspor 20,6 milyar menjadi 436 milyar (naik sebesar 2116,51%)
  3. Pengiriman domestik mengalami kenaikan, pada tahun 2018 sampai dengan 2023, yang sebelumnya 19.067 frekuensi naik menjadi 33.800 frekuensi (naik sebesar 56,41%), dengan nilai 1,30 triliun naik menjadi 1,96 triliun (naik sebesar 66,33%)
  4. PNPB tahun 2018 sampai dengan 2020 dari Rp.545.000.000 menjadi Rp.660.000.000 naik sebesar 21,01%
  5. Tingkat Kepuasan Masyarakat yang sebelumnya 86.25 meningkat menjadi 96.13
  6. Dari tahun 2018 sampai dengan 2023 Sertifikat HACCP dari 19 menjadi 75 sertifikat (naik sebesar 394,74%). Sertifikat CPIB dari 8 menjadi 57 sertifikat (naik sebesar 712,5%)
  7. Dampak sosial meningkatnya kemampuan masyarakat terhadap internet dan peningkatan pemahaman terhadap prosedur perizinan dimana sistem terintegrasi melalui Aplikasi Si Chupang
  8. Dampak ekonomi yaitu meningkatnya jumlah ekspor dan lalu lintas domestik komoditi perikanan dan biaya transportasi pengguna jasa yang tadinya mencapai Rp.100.000 – Rp.500.000 menjadi nol biaya
  9. Dampak untuk tata kelola pemerintahan yaitu terciptanya pemerintahan yang efektif, efisien akuntabel dan transparan seperti penghematan penggunaan kertas sebanyak 50% (paperless)

10. Pembayaran non-tunai (cashless) dan tidak membutuhkan banyak personil dalam bekerja/efisiensi SDM.

➤ Latar Belakang Pengembangan Aplikasi :

1. Sulitnya Akses Layanan Sertifikasi Bagi Pengguna Jasa;
2. Tersebarnya Pengguna Layanan Yang Cukup Jauh, berkisar 46 - 192,6 KM;
3. Belum terintegrasi Layanan Sertifikasi melalui sistem aplikasi;
4. Membutuhkan SDM dan Anggaran yang Besar Dalam Pelayanan.

➤ Fitur unggulan :

1. Permohonan melalui Android
2. Pengguna jasa tidak perlu datang ke kantor, hanya perlu menggunakan handphone Android atau iOS untuk mendapatkan pelayanan satu pintu
3. In Line Inspection
4. Hanya membutuhkan petugas 1-2 orang dalam merespon permintaan pelayanan pengguna jasa
5. Pengurangan pemakaian kertas/paper less
6. Waktu layanan hanya 30 menit
7. Biaya transportasi nol biaya
8. Beberapa Aplikasi telah Terintegrasi melalui Aplikasi Si Chupang New

➤ Penayangan video pengembangan aplikasi Si Chupang New

➤ Penayangan video manual penggunaan aplikasi Si Chupang New

Materi ketiga :

➤ Standar Pelayanan Balai KIPM Mataram 2025 :

1. Sebagai acuan ketentuan tentang jenis dan produk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Balai KIPM Mataram
2. Sebagai tolak ukur kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan Balai KIPM Mataram;

➤ Maklumat Pelayanan

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan, memberikan pelayanan sesuai standar

pelayanan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan melakukan perbaikan secara terus menerus, serta bersedia menerima Sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar;

➤ Kebijakan Mutu

Menjamin Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Adalah Suatu Kebijakan Otoritas Kompeten Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan Keteladanan, Kebersamaan, Dedikasi, Kerja Keras dan Disiplin Berdasarkan Kaidah Profesionalisme;

➤ Visi :

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu yang terdepan untuk memastikan keamanan, kualitas, keberlanjutan dan daya saing hasil kelautan dan perikanan, dalam rangka mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong.

➤ Misi :

1. Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikasi, surveilans, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring.
2. Meningkatkan penerapan praktik yang baik di setiap rantai pasok dan kepatuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan.
3. Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;

➤ Moto Pelayanan : **“KOMPAK”**

**K : KOMPETEN**

Adalah mampu melakukan suatu pekerjaan yang didasari oleh pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan standar kerja yang ditetapkan.

**O : OPTIMIS**

Adalah mampu melakukan suatu pekerjaan yang didasari oleh pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan standar kerja yang ditetapkan

**M : MELAYANI**

Adalah Memberi pelayanan kepada orang lain dan lingkungan dengan tulus ikhlas, tanpa pamrih dan tidak mengharapkan imbalan

**P : PROFESIONAL**

Adalah melakukan pekerjaan dengan benar dan sesuai etika dan sikap-sikap professional seperti disiplin, bertanggung jawab serta berintegritas

**A : AKUNTABEL**

Adalah pertanggung-jawaban secara terukur dalam pelaksanaan tugas-tugas yang terukur secara kuantitas maupun kualitas dan sesuai dengan standar yang ditetapkan

**K : KREATIF**

Adalah mampu untuk mengembangkan ide-ide baru dan menemukan cara-cara baru untuk memandang masalah menjadi peluang

➤ Janji Pelayanan

1. Kami siap memberi layanan sertifikasi produk perikanan secara profesional sesuai standar.
2. Kami siap memberikan layanan sertifikasi produk perikanan dengan sikap ramah, sopan dan sepuh hati.
3. Kami siap memberikan layanan sertifikasi produk perikanan yang diselesaikan dalam waktu 30 menit jika dokumen permohonan yang diperlukan telah terpenuhi dan lengkap.
4. Jika dalam penerbitan sertifikasi produk perikanan melebihi waktu yang ditetapkan kami siap memberikan kompensasi kepada pengguna jasa;

➤ Komponen Standar Pelayanan :

- A. Komponen Service Delivery (proses penyampaian pelayanan ) meliputi:.

1. Persyaratan;
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
3. Jangka Waktu Pelayanan;
4. Biaya/Tarif;
5. Produk Pelayanan; dan
6. Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan dan Apresiasi.

B. Komponen Manufacturing (proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi ) meliputi:

1. Dasar Hukum;
2. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas;
3. Kompetensi Pelaksana;
4. Pengawasan Internal;
5. Jumlah Pelaksana;
6. Jaminan Pelayanan;
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan; dan
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana;

➤ Jam Pelayanan

Jam Operasional Pelayanan Balai KIPM Mataram dilaksanakan setiap hari dengan ketentuan sebagai berikut :

- Senin s/d Kamis : 07:30 – 16.00 Wita
- Jum'at : 07:30 – 16:30 Wita
- Sabtu s/d Minggu dan Hari Libur Nasional : 08:00 – 13.00 Wita;

➤ Kompetensi Petugas

1. Memahami pelayanan sertifikasi CPIB, CPIB Kapal, CBIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB, SKP, HACCP, SMKHP, serta Pemeriksaan/uji mutu hasil perikanan;
2. Menguasai aplikasi komputer di bidangnya (minimal Ms. Office dan Internet);
3. Memiliki kompetensi administrasi (verifikasi kelengkapan dokumen, dsb);
4. Memahami kode etik petugas Petugas Pelayanan;

5. Mampu memberikan pelayanan dengan menerapkan senyum, sapa, salam, sopan, santun, ramah dan memahami peraturan dalam memberikan pelayanan; dan
  6. Memiliki sertifikat pelatihan di bidang teknis produksi mutu primer dan produksi mutu pasca panen, pelatihan Budaya Pelayanan Prima atau pelatihan pelayanan publik lainnya;
- Personal Pengawasan Internal
  - Petugas Penandatanganan SMKHP
  - Petugas Verifikator Dokumen
  - Petugas Pemrosesan dan Pencetakan SMKHP
  - Petugas Front Office
  - Sarana Pengaduan
    - 1)Pengaduan Langsung/Tatap Muka;
    - 2)Melalui Kotak Pengaduan;
    - 3)Melalui Email Balai KIPM Mataram;
    - 4)Melalui telepon/whatsapp Balai KIPM Mataram; dan
    - 5)Melalui website [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)
  - Alur Pengaduan
  - Sarana Prasarana Ruang Pelayanan
  - Sop dan Layanan Balai Kipm Mataram 2025
  - Prosedur Penerbitan SMKHP
  - Pemeriksaan/uji mutu hasil perikanan

#### **2.4. Diskusi dan Tanya Jawab**

- Penanya : Marsha dari Perusahaan PT. Lobster Origin Paradise  
 Pertanyaan : Berapa Tarif dari Penerbitan Sertifikat CBIB ?  
 Jawaban : Tarifnya Nol Rupiah
- Penanya : Arum Padmarani dari Dinas Kelautan Dan Perikanan Lombok Barat  
 Pertanyaan : Pelayanan Publik di Balai KIPM Mataram sangat bagus dan mantap saya merasakan sendiri dampaknya sebagai salah satu instansi

pemerintah yang banyak membutuhkan pelayanan di BKIPM Mataram, Terima Kasih untuk BKIPM Mataram semoga tambah sukses selalu Jika kami membutuhkan data seperti data lalu lintas produk perikanan di Propinsi NTB apa bisa langsung bersurat ke kantor BKIPM Mataram tidak melalui pusat?

Jawaban : Terima Kasih atas kesannya terkait untuk pelayanan yang ada di BKIPM Mataram dan untuk permintaan data silakan bersurat kami siap memberikan data secara umum tapi jika terkait alamat perusahaan atau identitas perusahaan merupakan rahasia dari pelanggan kami.

➤ Penanya : Lalu Achmad Tan Tilar dari Universitas 45 Mataram

Pertanyaan : Jika mahasiswa ingin magang atau penelitian di BKIPM Mataram bagaimana prosedurnya dan apakah pengujian misalnya bakteri kita mahasiswa harus bayar ?

Jawaban : Untuk mahasiswa silakan melakukan magang atau penelitian di BKIPM Mataram dan tidak ada biaya/gratis untuk pengujian jika memang pengujian yang dilakukan oleh mahasiswa adalah sama dilakukan dengan pengujian yang ada di BKIPM Mataram tidak perlu melakukan pembayaran atau gratis tetapi jika tidak ada dengan yang ada di BKIPM Mataram maka dilakukan pembayaran.

➤ Penanya : Yosef Dwi Irwan dari BBPOM Di Mataram

Pertanyaan : Jika bias kita bersinergi pada saat melakukan pengawasan, sehingga pasar yang dikunjungi dapat dilihat lebih jelas dari beberapa jenis factor yang perlu dipantau.

Jawaban : Saran yang baik sekali, akan kami tingkatkan sinergi sebelum pelaksanaan kegiatan pengawasan di pasar.

## 2.5. Foto Kegiatan



# 03

## PENUTUP

### 3.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Forum Konsultasi Publik dapat ditarik kesimpulan :

1. Konsultasi publik perlu dilakukan dengan mengikutsertakan publik/ masyarakat terutama yang berkaitan erat dengan tugas pokok Balai KIPM Mataram;
2. Dengan dilaksanakannya konsultasi publik, akan diperoleh masukan-masukan dan saran untuk demi kelancaran pelaksanaan pelayanan;

### 3.2. Saran

1. Kegiatan seperti ini sebaiknya terus dilakukan agar kebijakan yang ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik;
2. Masukan yang diperoleh dalam pertemuan agar segera ditindaklanjuti agar kebijakan yang ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik oleh petugas maupun pengguna jasa.

# LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU**  
**HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU**  
**DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM**

JALAN ADI SUCIPTO, PEJARAKAN KARYA KEC. AMPENAN - MATARAM 83124  
TELEPON (0370) 6194701, 6194702, FAKSIMILE (0370) 6194703  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [bkipmmataram@kkp.go.id](mailto:bkipmmataram@kkp.go.id)

**BERITA ACARA**  
**KONSULTASI PUBLIK STANDAR PELAYANAN**  
**BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL**  
**PERIKANAN MATARAM**

**B.82/BKIPM.MTR/PDS.240/V/2025**

Pada hari ini Jumat Tanggal Enam Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Farchan,S.Pi.,MP.  
NIP : 19700205 199103 1 003  
Pangkat/Golongan : Pembina/IVa  
Jabatan : Plt. Kepala  
Instansi : BKIPM Mataram

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

1. Tokoh Masyarakat (terlampir)
2. Akademisi (terlampir)
3. Dunia Usaha (terlampir)
4. Instansi Terkait (terlampir)

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak pertama menjelaskan kepada pihak kedua terkait Standar Pelayanan Publik pada BKIPM Mataram, selanjutnya pihak kedua mengetahui dan menyetujui Standar Pelayanan Publik BKIPM Mataram sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Nomor 82/KEP-BKIPM/2019 Tentang Standar Pelayanan Publik Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Standar Pelayanan Publik BKIPM Mataram merupakan landasan, pedoman, dan tuntunan dalam memberikan pelayanan publik, baik yang bersifat internal ataupun eksternal sesuai dengan tugas dan fungsi setiap pegawai dan unit kerja di lingkungan BKIPM Mataram. Jenis pelayanan BKIPM Mataram adalah Pelayanan Jasa Publik yang terdiri dari :

1. Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
2. Sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB)
3. Sertifikasi Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Atas Kapal
4. Sertifikasi Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB)
5. Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik (CPOIB)
6. Sertifikasi Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik (CDOIB)
7. Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP)
8. Sertifikasi Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu / *Hazard Analysis End Critical Control Point* (PPMMT/HACCP)

9. Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
10. Pemeriksaan / Uji Mutu Hasil Perikanan

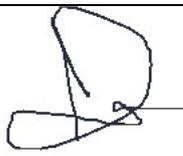
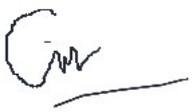
Demikian Berita Acara Penyusunan Standar Pelayanan Publik di BKIPM Mataram dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

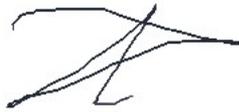
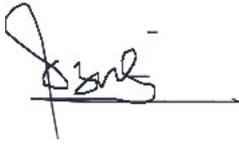
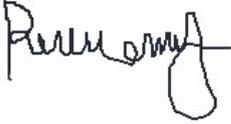


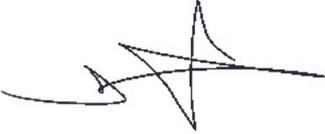
Dibuat di Mataram  
Pada tanggal 16 Mei 2025  
Pihak Pertama Plt. Ka. BKIPM  
Mataram,

M. Farchan, S.Pi., MP.

Pihak Kedua (Perwakilan Peserta Konsultasi Publik)

No	Nama	Asal Instansi/ Perusahaan	Tanda Tangan
1	Danu Tahir	CV. Anugrah Sahnied	
2	Marsha	PT. LOP	
3	Cici Razi	PT. Razindo	
4	Farhan Ramli	BKHIT NTB	
5	M. Andika	Badan Pusat Statistik NTB	
6	Irsyad Al Fahmi	Tokoh Masyarakat	
7	Arum Padmarani Swarna Aurajati	Dinas Kelautan Dan Perikanan Lombok Barat	
8	Dyah Hertutiningsih	Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab. Lombok Timur	
9	Nurhasanah Samad	Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	

10	Marzuki	Dinas Perikanan Kota Mataram	
11	Niken Nurhaliza	Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	
12	Irawan Hamido	UD Dahlia Group	
13	Baiq Haerun Nisa	Dinas Perikanan Kota Mataram	
14	Nanda	PT Live Shell Indonesia	
15	Irfana	Dinas Pwindustrian NTB	
16	Yosef Dwi Irwan	BBPOM di Mataram	
17	I Putu Hery Suditha	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kab. Lombok Utara	
18	Muhammad Ihsan	KPwBI Provinsi NTB	
19	Baiq Yunita Febrianti	PT Blue Ocean Lobster	

20	Lalu Achmad Tan Tilar	Universitas 45 Mataram	
21	Reza Aditya	CV Baura	
22	Muhammad Abdus Salam	CV Lautan Mas	



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU**  
**HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU**  
**DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM**

JALAN ADI SUCIPTO, PEJARAKAN KARYA KEC. AMPENAN - MATARAM 83124  
TELEPON (0370) 6194701, 6194702, FAKSIMILE (0370) 6194703  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [bkipmataram@kkp.go.id](mailto:bkipmataram@kkp.go.id)

Nomor : B.78/BKIPM.MTR/TU.330/V/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Undangan

14 Mei 2025

Yth. Daftar Undangan Terlampir

di Tempat

Sebagai instansi pemerintah yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat merupakan perwujudan fungsi aparatur Negara sebagai abdi masyarakat sehingga dipandang perlu untuk melaksanakan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Tahun 2025 yang merupakan landasan, pedoman, dan tuntunan dalam memberikan pelayanan publik, baik yang bersifat internal ataupun eksternal sesuai dengan tugas dan fungsi setiap pegawai dan unit kerja.

Adapun hal tersebut kami mengundang bapak/Ibu untuk dapat hadir secara daring yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 16 Mei 2025  
Waktu : 09.00 WITA s/d selesai  
Link Zoom : <https://us06web.zoom.us/j/81733458146?pwd=qXhtRYXwaok6oZP63g4jG7dFF4Vj6i.1>  
ID Zoom : 817 3345 8146  
Kode sandi : publik

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Terimakasih untuk tidak memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN, gratifikasi, dan benturan kepentingan

Pt. Kepala Balai KIPM Mataram,



Ditandatangani  
Secara Elektronik

M.Farchan

Lampiran

Nomor : B. /BKIPM.MTR/ /V/2025

Tanggal : 16 Mei 2025

**DAFTAR PENERIMA UNDANGAN****A. Instansi Terkait**

No	Nama/Jabatan
1.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat
2.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Mataram
3.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat
4.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur
5.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara
6.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah
7.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa
8.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat
9.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu
10.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima
11.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima
12.	Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat
13.	Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat
14.	Kepala Kantor Bea dan Cukai Provinsi Nusa Tenggara Barat
15.	Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan NTB

**B. Instansi Lainnya**

No	Nama/Jabatan
1.	Kepala Perwakilan BI Nusa Tenggara Barat
2.	Kepala Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat
3.	Kepala Balai Besar Badan POM Mataram
4.	Kepala BPBL Sekotong

**C. Akademisi**

No	Nama/Jabatan
1.	Dekan Fakultas Perikanan Universitas 45 Mataram
2.	Dekan Fakultas Perikanan Universitas Mataram

**D. Unit Pengolah Ikan**

No	Nama/Jabatan
1.	Direktur PT. Razindo Global Nusantara
2.	Direktur PT High Point Fisheries
3.	Direktur PT. Blue Ocean Lobster
4.	Direktur PT. Live Shell Indonesia
5.	Direktur PT. Lobster Origin Paradise
6.	Direktur CV. Baura
7.	Direktur CV. Anugerah Sahnied

8.	Direktur CV. Lautan Mas
9.	Direktur CV. Erpa Utama
10.	Direktur UD. Dahlia Group
11.	Direktur UD. Andre Seafood
12.	Direktur UD. Amira
13.	Direktur PT. Bibit Unggul
14.	Direktur PT. Hisenor Tecnology Indonesia
15.	Ketua Shirm Club Indonesia
16.	Direktur PT. Panen Berkah Sejahtera Bersama
17.	Direktur PT. Sukadana Makmur Sejahtera
18.	Direktur PT. Bintang Timur
19.	Direktur PT. Ginta Cargo
20.	Ketua Pokdakan Akar-akar Utara
21.	ST. Fish
22.	UD. Dian Sari Laut
23.	UD. Nasrah Aquarium
24.	UD. Highlander
25.	UD. Laut Biru
26.	UD. Versace
27.	Hypermart Epicentrum Mall mataram
28.	Lotte Mart Mataram
29.	UD. Tika Abi
30.	UD. Marzuki
31.	CV. 88
32.	PT. Cakra Gemilang Sejahtera
33.	UD. Cipta Raya Nusantara
34.	CV. Lombok Samudera Abadi
35.	CV. Alula
36.	UD. Encang Jaya

#### E. Tokoh Masyarakat

No	Nama/Jabatan
1.	Irsyad Alfahmi
2.	Usman Jayadi